

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang kontinu dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional berkaitan dengan perwujudan tujuan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, peningkatan kesejahteraan umum, dan pembentukan hajat hidup orang banyak. Terlibat dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan adalah aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didalam Negara maju dan berkembang pasti memiliki pola Pembangunan yang terstruktur dan tertata dengan baik serta memiliki sasaran yang tepat. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat maka pembangunan harus dilakukan secara jelas dan alami serta terencana dengan maksimal guna merumuskan tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Pembangunan tidak akan pernah tercapai bila tidak melibatkan masyarakat secara langsung didalamnya. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan agar menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dalam hal ini keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan ialah suatu hal yang mendasar dan cukup penting sebab akan menjadi penunjang untuk mencapai tujuan sukses atau gagalnya kebijakan tersebut. Tjokroamidjojo (1995:8) menyatakan bahwa pembangunan nasional: (1) Proses perubahan sosial, yaitu proses

perubahan masyarakat melalui berbagai cara hidup menuju proses pembangunan yang lebih baik, lebih maju dan lebih adil dalam berbagai bidang kehidupan; (2) Proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain; (3) Proses pengembangan masyarakat, oleh dan atas nama masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat. Jadi pembangunan adalah suatu proses yang terjadi selangkah demi selangkah dan terus-menerus membaik dengan dimensi waktu.

Seperti yang dikemukakan Conyers (1991: 154-155) terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan terdapat tiga sebab utama mengapa keterlibatan dari masyarakat dalam menyusun rencana mempunyai sifat yang penting:

1. Keterlibatan masyarakat secara langsung adalah cara untuk mendapatkan info lebih lanjut terkait keinginan dan kebutuhan, kondisi dan sikap dan perilaku masyarakat.
2. Masyarakat dapat percaya terhadap kebijakan pembangunan saat masyarakat terlibat dalam prosesnya secara langsung, karena dengan hal tersebut masyarakat akan lebih memahami lebih lanjut terkait program kebijakan tersebut dan akan merasa memiliki akan kebijakan kegiatan tersebut.
3. Memacu partisipasi umum dikarenakan akan muncul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi ketika masyarakat terlibat dalam pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didefinisikan sebagai ruang diskusi khusus antar penanggung jawab penyelenggara yang dilakukan dengan pola keterlibatan antara masyarakat dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) melalui musyawarah pada tingkatan bawah hingga di tingkatan teratas yaitu pusat dengan memiliki tujuan untuk merencanakan program kegiatan pembangunan untuk merealisasikan kebutuhan – kebutuhan penting masyarakat. Maka dari itu harus ada upaya upaya dalam mendukung

berjalannya kegiatan tersebut dengan maksimal, efektif dan terintegrasi dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat pusat. Hal ini adalah bagian daripada penyusunan rencana Pembangunan daerah dimana pelaksanaannya didasarkan pada dan pendekatan partisipatif dan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Proses *top-down* dan *bottom-up* lebih menggambarkan proses perencanaan di dalam pemerintahan yaitu dari lembaga/departemen dan daerah hingga ke pemerintah Pusat. Lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

Peran masyarakat sebagai bentuk keseriusan dalam memantau kemajuan pembangunan melibatkan ketersediaan ruang bagi partisipasi masyarakat untuk memberikan kontribusi dan upaya. Pentingnya pelibatan elemen masyarakat dalam rencana kebijakan pembangunan bermaksud agar program yang dibuat lebih terarah. Tidak dapat disangkal bahwa kenyataan keterlibatan masyarakat sangat penting ketika pembuatan program pemerintah. Hal ini berdampak positif terhadap keputusan yang diambil atau dilaksanakan, karena mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam teknis pelaksanaan musrenbang di Kota Malang. Hamzah & Nasrul, 2015 (dalam A. R. Rakasiwi: 2021: 5). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penyuluhan diperlukan untuk mengajak masyarakat agar mau terlibat dalam Musrenbang. Melalui sosialisasi mengubah cara pandang masyarakat dari merespon tindakan masyarakat menjadi dukungan partisipasi. Namun, kurangnya konsultasi atau pendekatan khusus antara Kota Malang dan pemerintah kota telah mengakibatkan pembangunan kota apatis. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab aparatur negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar kebijakan pembangunan kota Malang terlaksana dengan sebaik-baiknya. (Momentum.com 2019 dalam A. R. Rakasiwi: 2021: 5).

Kemudian pelaksanaan Musrenbang Kota Malang seperti retorika. (Anggraini 2019 dalam A. R. Rakasiwi: 2021: 5). Artinya dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan terjadi saat ini di Kota Malang masih terdapat dominasi yang kuat oleh kebijakan pemerintah melalui program SKPD. Rohman Ainur et al. (2009) berpendapat bahwa proses Musrenbang yang telah diprogramkan secara nasional dalam prakteknya terlalu instan, birokratis, politis dan terlalu rumit pada tingkatan teknis, musyawarah warga hanya bersifat formalitas, sehingga forum musyawarah menjadi terkesan asal terselenggara, belum lagi seberapa sempitnya ruang yang memungkinkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan, melakukan pengawalan maupun control terhadap terhadap dokumen otentik yang berisi mengenai konsensus pembangunan yang dicapai.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam serta memahami peran aktif partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan seberapa besar implementasinya dalam Musrenbang tersebut dengan mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(MUSRENBANG)”** yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen, Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersaji di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Klojen Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat Kecamatan, khususnya Kecamatan Klojen, kota Malang.
2. Mengetahui serta mengkaji aspek faktor yang mendukung dan yang menghambat proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di kecamatan Klojen, kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perencanaan Pembangunan dimana persoalan tersebut menjadi acuan dasar peneliti dan khususnya untuk memahami keterlibatan masyarakat ketika Musrenbang di Kecamatan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan, sehingga memunculkan kemungkinan untuk menambah sudut pandang baru dalam pengembangan teori dan menggunakannya untuk rekomendasi atau dasar bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan tentang perencanaan pembangunan khususnya dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

- b. Bagi akademisi, selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan referensi dalam pengembangan teori mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana pembangunan, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi Pemerintah Kota, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan rekomendasi dan evaluasi bagi Pemerintah guna menelusuri peran penting Keterlibatan masyarakat dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di tingkat Kota dan Kecamatan khususnya di Kecamatan Klojen.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Musrenbang dan khususnya untuk mengetahui peran penting partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan.